

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan perusahaan tidak bisa terlepas dari pengaruh lingkungan baik internal maupun eksternal, termasuk pengaruh lingkungan politik. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. (website resmi Wikipedia Indonesia, diakses pada 19 April 2018). Selain memperhatikan lingkungan internal, beberapa perusahaan sering kali menggunakan jalur politik untuk meningkatkan kinerja dan memaksimalkan laba sesuai dengan tujuan bisnis. Jalur politik yang dimaksud adalah keterkaitan perusahaan dengan pejabat pemerintah dan partai politik. Perusahaan mengupayakan adanya kedekatan dengan pemerintah agar segala keperluannya dipermudah dengan sistem etika balas budi.

Ikatan politis didasari karena adanya kesadaran pelaku bisnis bahwa elite politik memiliki kewenangan terhadap perumusan kebijakan yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan. Menurut Fisman (2001) koneksi politik dipercaya sebagai suatu sumber yang sangat berharga bagi banyak perusahaan. Keterkaitan politik dan bisnis seperti hubungan timbal balik, dimana peran politik dalam perumusan berbagai kebijakan yang dapat mendorong keberhasilan bisnis tetapi pelaku bisnis harus bersedia membantu partai politik dalam hal pendanaan

sebagai konsekuensinya. UU Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 34 dan 35 tentang Partai Politik di Indonesia menyebut tiga sumber keuangan partai politik. *Pertama*, iuran anggota. *Kedua*, sumbangan yang sah menurut hukum, baik dari perseorangan (anggota maupun bukan anggota) maupun dari perusahaan dan/atau badan usaha dalam batas maksimal yang ditentukan dalam Undang-Undang. Sumbangan ini dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa. Sumbangan perseorangan anggota partai politik diatur dalam AD dan ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai masing-masing). Perseorangan yang bukan anggota partai politik dapat memberikan sumbangan maksimal Rp 1 miliar, sedangkan perusahaan dan/atau badan usaha dapat memberikan sumbangan kepada partai politik paling banyak Rp 7,5 miliar dalam satu tahun anggaran. *Ketiga*, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diterima secara proporsional berdasarkan jumlah suara yang diperoleh pada pemilu sebelumnya.

Kebutuhan dana bagi partai politik akan memuncak saat tahun politik yaitu pada pemilihan umum. Pada masa itu partai politik akan membutuhkan lebih banyak dana untuk biaya kampanye dan keperluan pemilihan umum lainnya. Faccio (2006) menyatakan bahwa suatu perusahaan dikatakan memiliki koneksi apabila setidaknya satu dari pemegang saham terbesar perusahaan (yaitu siapapun baik secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan 10% suara) atau jajaran direksi adalah seorang anggota parlemen, seorang menteri, atau seorang kepala negara, atau merupakan seseorang yang memiliki hubungan politik apabila paling tidak salah satu pimpinan perusahaan, pemegang mayoritas atau kerabat mereka pernah atau sedang

menjabat sebagai pejabat tinggi negara, anggota parlemen, atau pengurus partai berkuasa. Pendapat tersebut didukung oleh Purwoto (2011) yang mendefinisikan bahwa perusahaan terkoneksi politik ialah perusahaan yang dengan cara-cara tertentu mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah.

Menurut Faccio (2006) praktik *political connection* lebih umum terjadi pada perusahaan yang tingkat korupsi negaranya lebih tinggi. Tingkat korupsi di Indonesia dapat dilihat dari indeks persepsi korupsi (*Corruption Perception Index*) pada tahun 2015 yang dirilis oleh Lembaga *Transparency International* (TI) dimana Indonesia menempati peringkat ke-88 dari total pengamatan terhadap 168 negara dengan total skor CPI 36 dari total nilai 100. Sedangkan, pada tahun 2017 Indonesia menempati peringkat ke-96 dari 108 negara dengan total skor CPI 37 dari total nilai 100. Semakin besar skor yang didapat, maka semakin bersih negara tersebut dari korupsi (website resmi *Transparency International*, diakses pada 20 April 2018).

Menurut Faccio (2006) dorongan perusahaan untuk memiliki koneksi politik telah mendapat perhatian khusus dari pengamat ekonomi karena adanya indikasi perlakuan istimewa dari pemerintah, terlebih lagi bagi perusahaan yang dimiliki langsung oleh pejabat atau orang yang memegang posisi penting di dalam pemerintahan. Perusahaan yang memiliki koneksi politik akan mendapatkan perlindungan dari pemerintah, memiliki akses mudah untuk memperoleh pinjaman modal, resiko pemeriksaan pajak rendah sehingga membuat perusahaan semakin agresif dalam *tax planning* yang berakibat pada keburaman transparansi keuangan.

Berbagai macam hak-hak istimewa dapat diperoleh perusahaan dengan koneksi politik bahkan saat terjadi krisis keuangan perusahaan akan mudah mendapat dana talangan dari pemerintah. (Butje dan Tjondro, 2014). Pada hasil penelitian Su dan Fung (2013) menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

Jika perusahaan telah *go public*, maka masyarakat umum berhak menjadi pemilik saham. Kepemilikan publik merupakan saham yang dimiliki oleh publik atau masyarakat (Aprillia, 2013). Kepemilikan saham perusahaan oleh publik menandakan bahwa adanya transparansi dimana masyarakat dapat melihat dan memiliki hak untuk mengontrol kinerja perusahaan melalui laporan keuangan. Kepemilikan publik bisa bersifat memperkuat atau memperlemah pengaruh koneksi politik terhadap kinerja perusahaan. Adanya *monitoring* dan pengawasan dari berbagai pihak yang ketat, perusahaan akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan perumusan kebijakan dan menjalankan kegiatan operasinya.

Hasil penelitian Eforis (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap kinerja BUMN. Hal itu didukung juga oleh penelitian Purba (2004) yang menunjukkan bahwa jika proporsi saham publik lebih dari 40% maka kinerja perusahaan akan tinggi. Proporsi saham yang besar akan memotivasi adanya pengawasan ketat dan akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat.

Jika koneksi politik berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, maka kepemilikan publik akan memperkuat pengaruh tersebut karena perusahaan

terdorong untuk meningkatkan kinerjanya dengan adanya pengawasan publik yang ketat. Jika koneksi politik berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan, pengaruh itu akan bisa dikurangi dengan kepemilikan publik. Kepemilikan publik akan memperlemah pengaruh koneksi politik terhadap kinerja perusahaan *monitoring* masyarakat mampu memotivasi perusahaan untuk memperbaiki kinerjanya yang buruk.

Melihat dari latar belakang yang telah dijabarkan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Koneksi Politik terhadap Kinerja Perusahaan dengan Kepemilikan Publik sebagai Variabel Moderasi**”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, berikut rumusan masalah penelitian ini :

1. Apakah koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan?
2. Apakah kepemilikan publik memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap kinerja perusahaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh koneksi politik terhadap kinerja perusahaan.

2. Untuk menguji peran kepemilikan publik pada koneksi politik terhadap kinerja perusahaan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian ini dapat dirasakan oleh beberapa pihak, yaitu bagi peneliti, bagi pembaca, dan bagi peneliti selanjutnya. Berikut manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini :

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya sehingga bisa mengkaji lebih dalam mengenai pengaruh koneksi politik terhadap kinerja perusahaan dengan kepemilikan publik sebagai variabel moderasi.

2. Bagi Investor

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan serta tambahan informasi pengaruh koneksi politik terhadap kinerja perusahaan dengan kepemilikan publik sebagai variabel moderasi.

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam sistematika skripsi terdapat lima bab yang di dalamnya berisikan sub bab tentang uraian penjelasan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang menjadi referensi penelitian, landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis yang berhubungan dengan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang prosedur atau cara untuk mengetahui hal-hal dalam penelitian dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis. Isi dari bab ini meliputi hal-hal seperti rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini menjelaskan mengenai data yang telah terkumpul dan pembahasan terkait analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini baik analisis deskriptif maupun

analisis statistik. Sub bab yang ada di bab ini adalah gambaran subjek penelitian, analisis data dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan atas analisis yang telah dilakukan. Bab ini juga membahas evaluasi terkait dengan keterbatasan pada penelitian kali ini beserta saran atas keterbatasan tersebut. Sub bab yang ada pada bab ini adalah kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.

